

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Grafindo
- Fauzan, Muhammad. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Purwokerto. STAIN Press
- Handayani, Rina Tri, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, Joko Tri Atmojo. 2020. "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity". *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. Volume 10 Nomor 3:373-380
- Hernuningsih, Dwi. "Penguatan Konvergensi media guna mewujudkan masyarakat informasi dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa", *Taskap* (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014)
- H.R, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- H.R, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara Kata Pengantar SF. Marbun*. Yogyakarta. UII Press.
- Hasyimsah, dkk. 2010. *Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan Sistem Dan Bentuk Pemerintahan Di Indonesia, jilid 6*. Jakarta. PT. Lentera Abadi.
- Junita, Afrah. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah", *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, Vol 4, No. 2
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

- Manan, Bagir. 1993. *Perjalanan Historis Pasl 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*. Karawang. UNSIKA.
- Pamuji, Kadar. “Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3:2014
- Rumokoy, A. Donald. 2004. *Dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi negara*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sianturi, Anastasia. Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai. “Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3
- Sibuea, Hotman P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta. Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press
- Stroink, F.A.M dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006. *Wewenang mahkamah konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sudrajat, Tedi. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta. Sinar Grafika
- Supriatna, Tjahya. 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta. Bumi Aksara
- Susilo, Aditya, C. Martin Rumende, dkk. 2020. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* | Vol. 7, No. 1

Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta. Sinar Grafika

Widjaja, H.A.W. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Widjaja, H.A.W. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta. Rajagrafindo Persada

Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 973/224 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Tahun 2020

Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 973/224 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Tahun 2020

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zainnudin Kasubdit Penerimaan di Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, 29 Januari 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Sapta Kasubdit Penagihan di Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, 08 April 2021

Media Daring

Direktorat Jenderal Pajak. __. Retribusi Daerah.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf, diakses pada 22 Desember 2020

Kementerian Keuangan. Frequently Asked Questions Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020), <https://kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>, diakses pada 20 September 2020

Plitt, Laura.2021. “Covid-19 bukan pandemi, tapi sindemi’, kata sejumlah ilmuwan – apa maksudnya dan bagaimana penanganannya?”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54912673>, diakses pada 13 Januari 2021

Rehia Sebayang, “WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>, diakses pada 13 Januari 2021

Tjiptono, Fandi. 2000. *Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II*. Yogyakarta. Andi

Yakti, Ariyani Widyastuti. 2020. Sri Mulyani: 476 Pemda Ajukan Perubahan APBD Tangani Corona, Rapat Komite IV DPD RI dalam Tempo.Co, <https://bisnis.tempo.co/read/1340166/sri-mulyani-476-pemda-ajukan-perubahan-apbd-tangani-corona>, diakses pada 4 April 2021, pkl. 23.35 WIB